



## Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima

Renni Sartika<sup>1</sup>, Arief Hidayatullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima

E-Mail: [rennisartika17@gmail.com](mailto:rennisartika17@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to find out the Regional Government Communication strategy in an effort to socialize Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2019 concerning the Implementation of Child Protection in Bima Regency. This step is an effort to reduce the number of detentions and sexual violence against children. Also, considering the importance of information facilities about sexual education for children, in reducing the phenomenon of reduction and sexual violence against children in Bima District. The type of this research is descriptive research with a qualitative approach. The location of this research is in the Office of the Regional Technical Implementation Unit for the Implementation of Women's Empowerment and Child Protection (UPTD P3AP2KB), the Social Service and the Education Office of Bima Regency. While the data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data analysis technique in this study uses an interactive model according to Miles and Huberman namely; (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) conclusion/verification. The results of the study show that sex education is designed to assist children in obtaining an appropriate understanding of their own sexual development as well as the personal and social development that accompanies this sexual development. So that the role of the Regional Government in efforts to socialize Regional Regulation No. 5 concerning the Implementation of Child Protection in Bima Regency is very important. This is not only a concern for the Government but also for parents, the general public, schools and the media to provide protection for children. Because a proper understanding of sex and sexuality will be a strength as well as a fortress for children from cases of vandalism and sexual violence against children. Strengthening socialization and education regarding the importance of early childhood sex education to parents/guardians using a collaborative approach, so that the general public is more aware of child protection in Bima District.*

**Keywords:** Strategy, Communication, Protection, children

**Abstrak.** Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam upaya mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bima. Langkah ini sebagai upaya untuk menekan angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Serta, mengingat pentingnya sarana informasi tentang pendidikan seksual bagi anak, dalam mengurangi fenomena pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P3AP2KB), Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bima. Sedangkan Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dirancang untuk mendampingi anak memperoleh pemahaman yang tepat tentang perkembangan seksual dirinya serta perkembangan pribadi dan sosial yang mengiringinya perkembangan seksual tersebut. Sehingga peranan Pemerintah Daerah dalam upaya sosialisasi Perda Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kabupaten Bima menjadi sangat penting. Tidak hanya menjadi perhatian bagi Pemerintah namun juga turut serta orang tua, Masyarakat Umum, Pihak Sekolah, dan Media dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak. Sebab Pemahaman yang tepat tentang seks dan seksualitas akan menjadi kekuatan dan sekaligus benteng bagi anak dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan seks anak usia dini kepada wali murid/orangtua yang dilakukan dengan pendekatan kolaborasi, agar masyarakat umum lebih menyadarimengenai perlindungan anak di Kabupaten Bima.

**Kata kunci:** Strategi, Komunikasi, Perlindungan, anak

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 09, 2023

\* Renni Sartika, [rennisartika17@gmail.com](mailto:rennisartika17@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Di masa informasi modern yang sangat kompetitif ini, informasi merupakan kebutuhan dasar tiap orang guna pengembangan individu dan area sosial, serta menggambarkan bagian penting buat pertahanan negeri (Febriani, & Juliani, 2022). Publik senantiasa menjajaki pertumbuhan zaman, terlebih dengan pertumbuhan teknologi yang begitu pesat disaat ini, informasi pastinya sangat berarti untuk publik. Pengetahuan terjalin atas dasar komunikasi antar pribadi (Arfa, 2017).

Komunikasi adalah kebutuhan manusia yang dibutuhkan sebab komunikasi memenuhi beberapa kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan informasi. Sebab Indonesia dikala ini terletak dalam masa keterbukaan informasi selaku wujud demokrasi, hingga hak atas informasi ialah hak asasi manusia serta kebutuhan akan informasi publik tidak bisa dibatasi. Transparansi informasi publik ialah salah satu karakteristik dasar negeri demokrasi, melindungi kedaulatan rakyat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Alexandrina & Chrisdina, 2021).

Demikian dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Bima. Upaya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaran perlindungan anak di Kabupaten Bima menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah karena merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, dan merupakan mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan pelayanan terhadap akses informasi/bantuan hukum secara efektif dan efisien, serta proses rekonsiliasi yang relatif simpel dalam upaya perlindungan anak.

Sebab, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dimana pada tahun 2022, jumlah kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak mencapai angka 1.022 kasus. Dengan rincian, jumlah kekerasan pada perempuan dewasa mencapai 350 kasus, sedangkan, jumlah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak mencapai 598 kasus.

Dalam hal kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, Kabupaten Bima berada di urutan keempat setelah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Lombok Barat. Berikut tabel data jumlah kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Kabupaten dan Kota di Provnsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 1**  
**Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan Seksual terhadap anak di NTB**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1	Kabupaten Lombok Timur	181
2	Kabupaten Lombok Utara	104
3	Kabupaten Lombok Barat	78
4	Kabupaten Bima	62
5	Kabupaten Lombok Tengah	50
6	Kabupaten Dompu	50
7	Kota Mataram	40
8	Kota Bima	33
<b>Total</b>		<b>598</b>

*Sumber: Data DP3AP2KB Prov, 2022*

Berdasarkan data diatas, angka kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur, yakni 181 kasus. Kemudian, di Kabupaten Bima tercatat sebanyak 39 kasus, Kabupaten Dompu sebanyak 56 kasus, Kota Bima sebanyak 33 kasus, Kota Mataram sebanyak 40 kasus, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 78 kasus, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 56 kasus, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 104 kasus.

Untuk itu menjadi penting bagi peneliti, untuk melakukan penelitian terhadap strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam upaya mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bima. Langkah ini sebagai upaya untuk menekan angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima. Serta, mengingat pentingnya sarana informasi tentang pendidikan seksual bagi anak, dalam mengurangi fenomena pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P3AP2KB), Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat permasalahan yang terjadi.

Sedangkan Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Selanjutnya Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Muhammad (2009:148) dimana model interaktif ini terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini melibatkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD P3AP2KB, Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Sosial Kabupaten Bima, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas pemerhati masalah sosial di Kabupaten Bima. Penentuan subyek penelitian atau informan kunci tersebut dipilih berdasarkan tugas Pokok dan fungsi, serta keterlibatannya dalam urusan penyelenggaraan perlindungan, perhatian, pengembangan, bantuan hukum dan jaminan sosial bagi anak di Kabupaten Bima.

**Tabel 2. Jumlah Informan Kunci/Subyek Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala UPTD P3AP2KB	1
2.	Kepala Dinas Dikbudpora	1
3.	Kepala Dinas Sosial	1
4.	Ketua LSM Akar Nusa	1

Untuk menentukan informan kunci pada penelitan ini peneliti mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, perhatian dan keahliannya masalah edukasi seks dan upaya penurunan angka pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima.

Selanjutnya, pelaksanaan wawancara untuk mendapatkan data dari responden dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2023, dengan cara mendatangi langsung Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD P3AP2KB, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Sosial Kabupaten Bima, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Akar Nusa.

Selanjutnya karakteristik responden atau subyek penelitian dideskripsikan menurut tingkat pendidikan. Dimana jenjang pendidikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD P3AP2KB yaitu strata dua (S2) bergelar magister hukum. Demikian jenjang pendidikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yaitu strata dua (S2) bergelar Magister Manajemen. Selanjutnya jenjang pendidikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima yaitu strata dua (S2) bergelar Magister Hukum, serta Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Akar Nusa bergelar Sarjana sosial. Dari data ini diketahui bahwa semua subyek penelitian bisa mengerti maksud pertanyaan yang diberikan dan bisa memahami informasi terkait edukasi seks dan upaya mengatasi masalah pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima.

## **Pembahasan**

Pertambahan usia menyebabkan perubahan hormon dan psikologis anak yang berubah, dimana masa anak-anak ke masa remaja, anak-anak yang berada pada masa peralihan cenderung berupaya untuk mencari jati dirinya, memberontak, dan bertindak semaunya. Psikologis anak juga harus diperhatikan, agar sang anak tidak melakukan tindakan yang salah, peran orang tua sangat penting untuk mendekati dengan sang anak, agar sang anak lebih terbuka kepada orang tuanya. Dengan demikian orang tua dapat memberikan nasehat kepada sang anak tentang apa yang boleh dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan. Akan tetapi nasehat hanya akan membuat anak merasa terkekang dan menjadi bersikap lebih tertutup kepada orang tua mereka.

Dengan demikian Pemerintah Daerah perlu menerapkan strategi Komunikasi dalam upaya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak kepada seluruh masyarakat kabupaten Bima dengan berkoordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah P3AP2KB Kabupaten Bima yang memiliki tugas pokok di Bidang perlindungan anak. Kemudian membentuk satgas-satgas disetiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi kembali atau adanya penurunan angka tindak kekerasan. Selanjutnya memberikan pembinaan terhadap anak-anak. Salah satunya ialah pemenuhan hak anak.

Didalam perwujudan program layak anak di Kabupaten Bima, Pemerintah Daerah juga membentuk dan menjalankan beberapa program lain yakni menggerakkan forum anak di Kabupaten Bima, forum anak ditingkat Kecamatan, forum anak di kelurahan/desa. Forum anak mempunyai peran penting dalam hal pencegahan/pengurangan angka pada kasus kekerasan seksual pada anak, baik anak sebagai korban maupun anak menjadi pelaku. Jadi tugas mereka itu untuk merangkul teman-teman mereka, memberikan sosialisasi pencerahan dan mengajak anak-anak yang lain berperan aktif dalam kegiatan berorganisasi yang bernama FORABIM (Forum Anak Bima)".

Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran orang tua, guru, masyarakat juga dilibatkan sebagai partner Pemerintah harus juga intens dalam memberikan pendidikan seksual dan perlindungan kepada anak. Berikut adalah porsi peran yang dimiliki oleh orang tua, guru, masyarakat dan Pemerintah dalam mendukung program daerah layak dan ramah anak di Kabupaten Bima berdasarkan sosialisasi dan renja SKPD UPTD P3AP2KB Kabupaten Bima yaitu:

- a. Peran Orang Tua Orang tua sebagai pendidik pertama di rumah wajib memberikan Pendidikan yang baik-baik berupa Pendidikan agama, Pendidikan budaya etnisnya, dan bahkan Pendidikan mengenai seksualitas bagi anak. Memang Sebagian besar orang tua merasa asing dan enggan membicarakan seksualitas. Padahal pemahaman tersebut sangat penting bagi anak-anak. Tentunya pemberian pemahaman tersebut perlu ada batasan-batasan yang perludikaji. Seperti contoh bagaimana jika laki-laki dan perempuan sebagai makhlukciptaan Tuhan itu diciptakan berpasang-pasangan dan harus mengikuti ajaran Tuhan dan Nabi-Nya. Pemahaman ini diberikan melalui metode ceramah dan diskusi. Namun, sebagai orang tua harus memahami apa yang harusdisampaikan kepada anak-anaknya. Sebab orang tua sebagai kunci utama dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan perilaku anak.
- b. Peran Pendidik Para pendidik (guru) memiliki peran mendidik para partisipan didik dalam satuan Pendidikan di sekolah. Dalam hal ini guru sekolah melalui guru BP atau BK yang terdapat dalam satuan Pendidikan memberikan Pendidikan tambahan diluar jam sekolah dengan memberikan pemahaman seksualitas, seperti masa pubertas, bagaimana sikap anak perempuan terhadap lawan jenisnya, dan sebagainya. Hal ini sangat penting bagi mereka. Sebab sekolah adalah wadah kedua bagi mereka dalam memperoleh pemahaman, ilmu, pengetahuan dan Pendidikan yang baik. Terutama mengani Pendidikan seksual sebagai upaya antisipasi, pengetahuan, pemahaman guna mencegah perilaku seks bebas dan upaya menghindari.
- c. Peran Masyarakat. Masyarakat sekitar dalam lingkungan baik itu tokoh seperti tokoh agama, tokoh masyarakat (RT, RW, Lurah, Camat dan Organisasi Kemasyarakatan) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Bahkan jika da para predator atau penjahat kelamin yang melakukan tindakan asusila di wilayahnya perlu cegah dan ditindak agar kurangnya korban dan adanya efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut. Tentunya peran penting masyarakat mengenai Pendidikan seksual dengan memberikan penyuluhan dan komunikasi yang baik kepada warga disekitarnya. Pendidikan agama maupun Pendidikan modern cukup memberikan wawasan tambahan.

- d. Peran Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan berwenang mengeluarkan undang-undang/perda serta memberikan sanksi atau hukuman melalui alat negara (Polri-TNI) dan pengadilan berperan penting membuat aturan dan Tindakan bagi para pelaku kejahatan, terutama penjahat kelamin (predator) yang telah membuat suram masa depan anak, remaja, dan istri yang mendapat perlakuan tidak baik dari suaminya. Sehingga, perbuatan jahat yang dilakukan para pelaku kejahatan terbalaskan dengan adanya hukuman berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut. Walaupun, hukuman yang mereka jalani belum tentu mengobati luka yang dialami korban dan orang tua korban. Bahkan peraturan pemerintah terhadap sanksi yang diberikan kepada para pelaku masih menjadi perdebatan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan seks dirancang untuk mendampingi anak memperoleh pemahaman yang tepat tentang perkembangan seksual dirinya serta perkembangan pribadi dan sosial yang mengiringinya perkembangan seksual tersebut. Sehingga peranan Pemerintah Daerah dalam upaya sosialisasi Perda Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kabupaten Bima menjadi sangat penting. Tidak hanya menjadi perhatian bagi Pemerintah namun juga turut serta orang tua, Masyarakat Umum, Pihak Sekolah, dan Media dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak. Sebab Pemahaman yang tepat tentang seks dan seksualitas akan menjadi kekuatan dan sekaligus benteng bagi anak dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan seks anak usia dini kepada wali murid/orangtua yang dilakukan dengan pendekatan kolaborasi, agar masyarakat umum lebih menyadari mengenai perlindungan anak di Kabupaten Bima.

## Daftar Pustaka

- Adi, Rianto Dan Prasadja, Heru. 1993. *Langkah-Langkah Penelitian Sosial*. Arcan. Jakarta. Adi, Rianto. 2004. *Metodelogi Sosial Dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Ahmad, D. N. (2017). Pengaruh pendidikan seksual dalam keluarga terhadap perilaku penyimpangan dan pelecehan seksual pada remaja. *Jurnal Pelangi*, 9(2).
- Alexandrina, E., Nova, P., & Chrisdina, C. (2021). Komunikasi Interpersonal Pada Komunitas dalam Mencapai Aktualisasi Diri Orangtua tunggal Perempuan Dikala Pandemi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 4(2), 112-129.
- Arfa, F. Persepsi Publik Pribumi dalam Menyikapi Masyarakat Pendatang di Karawang. *Komunikasi Antarbudaya*, 97.
- Chomaria. 201 4. Kenali dan Tangani Pelecehan Anak. Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka.
- Choirudin, M. 201 4. Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini Dalam Belenggu Kekerasan
- Febriani, D. L., & Juliani, R. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 19-38. Seksual Terhadap Anak (Sebuah Upaya Preventif dan Protektif)
- Fhadila, K. D. (2017). Menyikapi perubahan perilaku remaja. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 2(2), 16-23.
- Hestningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19-33.
- ILya, N. (2020). *Pelaksanaan Layanan Dasar Bimbingan Dan Konseling Melalui Media Animasi Dalam Mengembangkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Anak Usia Dini Di Paud Angon Saka Kabupaten Tanggamus Tp 2020/2021* (DoctoralDissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Jailani, M. S. (2014). Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245-260.
- Kalijaga, D. K. P. U. S, 2019. Pengaruh Antara Intensitas Menonton Tayangan Televisi Dan Kendali Orang Tua Dalam Menonton Tayangan Televisi, Terhadap Perilaku Negatif Anak Usia Dini Di Tk Islam Syaichona Cholil Balikpapan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (T.Thn.). 1 996. Dipetik Juni Sabtu, 201 8, Dari <https://Kbbi.Web.Id/Makna>
- Mashudi, E. A. (2015). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 9(2).
- Moleong LJ. 201 2. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.